

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH BURUH
TANI TANPA AKAD DI AWAL**

(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syaria'ah**

Oleh

UTARI NUR PERMADI

NPM.1521030437

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H /2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH BURUH
TANI TANPA AKAD DI AWAL**

(Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)



Oleh

UTARI NUR PERMADI

NPM. 1521030437

Program Studi: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H /2019 M**

ABSTRAK

Pekerjaan buruh tani merupakan pekerjaan hampir setiap warga di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, meskipun pekerjaan buruh tani tidak sebagai pekerjaan utama. Praktiknya buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Awalnya buruh tani dipekerjakan atas pemilik tanah yang mempekerjakan untuk buruh tani diladangnya. Tetapi pemilik tanah pada saat mempekerjakan buruh tani tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan dari awal upah yang harus ia terima setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai buruh tani pada orang yang telah mempekerjakannya. Berbeda halnya dengan buruh tani borongan (panen padi) yang sudah jelas keentuan dan adanya kesepakatan upah yang diberikan buruh tani borongan yang berdasarkan luas tanah dan hari kerja. Sistem upah mengupah yang ada di desa Sidoharjo merupakan sistem upah mengupah yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan. Masalah yang sering timbul pada upah mengupah ini ialah pada saat upah diberikan pihak buruh terkadang merasa kurang puas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pembayaran upah-mengupah tanpa akad diawal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah upah-mengupah buruh tani tanpa akad diawal pada desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan upah-mengupah buruh tani dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap masalah upah-mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif. Studi pada buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam prakteknya nominal upah belum jelas dan untuk pemberian upah sesuai dengan keinginan si pemberi jasa. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab dalam praktek upah-mengupah yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat Ijarah yaitu harus menyebutkan jumlah upah yang diberikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Utari Nur Permadi

NPM: 1521030437

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Tanpa Akad di Awal.(Stadi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau dafatar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juli 2019
Penulis,



Utari Nur Permadi
1521030437



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
MENGUPAH BURUH TANI TANPA AKAD DI
AWAL (Studi Kasus di Desa Sidoharjo
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)**

**Nama : Utari Nur Permadi
NPM : 1521030437
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP.197012282000031002**

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003**

Ketua Prodi Muamalah

**Dr. H. A Khumaedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP.197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)**, disusun oleh **Utari Nur Permadi, Npm 1521030437, Jurusan Muamalah**. Telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Rabu / 31 Juli 2019, Ruang Sidang 2 Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Muslim, S.H.I, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far S.Ag.M.H.

Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Khairuddin, M.H.

19621022 199303 1002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)¹

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda,

“Barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R. Abdurazzaq).



¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, t,th), h.189.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai bukti dan serta hormat kasih sayang dari saya yang masih banyak kekurangan dan masih sangat haus dengan ilmu pengetahuan, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Umar dan Ibunda Sulimah yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai, serta sentiasa tak henti-hentinya selalu berdo'a dan yang menjadikan penyemangatku untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada almarhumah Mbah Mirah beliau yang sepanjang hidupnya selalu mendoakan cucunya sukses dalam studinya
3. Kepada kakak perempuanku Yuli Winarti, kakak ipar ku Asrori, dan keponakanku Al-Khalifi Zikri Hadi yang senantiasa menghiburku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan telah mendidiku menjadi mampu berfikir lebih maju, hingga mendapatkan gelar Sarjana.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sidoharjo pada tanggal 6 Mei 1997, dengan diberi nama Utari Nur Permadi anak dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Sulimah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan penulis yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Usia Dini di TK Nurul Huda Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada Tahun 2000-2003
2. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada tahun 2003-2009
3. Pendidikan Menengah Pertama di MTs N Sidoharjo Kecamatan way Panji Lampung Selatan pada tahun 2009-2012
4. Pendidikan Menengah Atas di SMA N 1 Kalinda Lampung Selatan pada tahun 2012-2015.
5. Pendidikan perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung yang kini telah berganti UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
Penulis

Utari Nur Permadi
NPM. 1521030437

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I selaku kajar dan sekjur jurusan muamalah yang senantiasa memberikan pengarahan atas setiap kekurangan dan motivasi untuk diri ini menyelesaikan skripsi.
3. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku, saudaraku, dan keluarga besarku yang selalu tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu yang selaku buruh tani dan pemilik lahan atau di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan para sahabat-sahabat seperjuanganku, khususnya Mu'amalah angkatan 2015, Lia Dwi Dana, Meilita, Audra Laili, Silvia Istiana, Ainul Janah, Nadia, Rani Febriyola, Ai Nurbaiti R, Arien, Hasna Q, Fety Martiya, Hesti, Onti, Nilan F, Yusneli yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini. Rekan-rekan KKN 123 Murti, Ian, Eka, Gee, Rosita, Mei, Ade, Deden, Hafiz, Dahri, dan Yuda. Rekan-rekan kontrakan POJOK.
9. Sahabat yang sudah sejak lama, yakni Wilda Okta Via Sari, Nia, Jay, Mila, Bella, Nita, Winda, Nur, dan Diani Saputri.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019
Penulis,

UTARI NUR PERMADI
NPM. 1521030437

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad	14
3. Macam-macam Akad	16
4. Akad Qhairu Lisan	22
5. Asas-asas Berakad dalam Islam	25
6. Berakhirnya Akad	33
B. Upah Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Upah (Ujrah)	39
2. Dasar Hukum Upah (Ujrah)	40
3. Rukun dan Syarat Upah(Ujrah).....	46
4. Macam-macam Upah (Ujrah)	50
5. Sistem Pembayaran Upah (Ujrah)	52
6. Berakhirnya Akad Upah.....	53

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sidoharjo	
1. Sejarah Desa Sidoharjo	55
2. Keadaan Demografis Desa Sidoharjo	57
3. Stuktur Organisasi Desa Sidoharjo	60

- B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad diawal di Desa SidoharjoKecamatan Way Panji Lampung Selatan..... 62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Tani Tanpa Akad diawal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan 67
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad diawal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji lampung Selatan..... 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci untuk lebih memahami maksud dari judul skripsi, maka akan dibahas pengertian beberapa kata dalam judul yang dianggap penting dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad diawal” (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan). Beberapa istilah judul yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Istilah tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

3. Upah Mengupah

Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan dengan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

³ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 115.

4. Buruh Tani

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari buruh tani ialah, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.⁵

5. Akad

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji tentang upah mengupah tanpa akad di awal yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Banyaknya persaingan dalam mencari pekerjaan, sehingga dalam dunia pekerjaan yang biasaya memiliki kesepakatan antara pekerja dan pemberi jasa, dan terdapat kesepakatan nominal upah dan kesepakatan kerja. Praktek upah-mengupah yang terjadi di desa Sidoharjo tidak seperti demikian, jadi praktek upah-mengupah haruslah sesuai dengan syariat Islam dan tertera dalam dalil-dalilnya. Karena dalam hukum Islam menganjurkan adanya kesepakatan di awal akad. Berbeda halnya pada

⁵Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 214

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 72.

praktek upah-mengupah yang terjadi di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, yang dimana tanpa adanya kesepakatan di awal akad.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat berkaitan dengan permasalahan khususnya dibidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Tanpa Akad di Awal.
- b. Judul yang diajukan dalam skripsi ini belum ada yang membahas, berdasarkan data dari jurusan, sehingga dapat memungkinkan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.⁷

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah dari majikan atau penyedia pekerjaan. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut

⁷ Mardani, *Op.Cit.*, h. 2.

dengan *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.⁸ Yang dalam keterangan Al-Qur'an surat Az-Zukhruf:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: ٣٤: ٢٣)

Artinya: Apa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az-Zukhruf: 32).⁹

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 491.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561.

Merujuk pada ayat diatas, dianjurkan kepada kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti halnya memberi pekerjaan kepada orang lain.

Mengenai upah yang tertuang dalam Al-Qura'an:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (آل عمران: ٥٧ : ٣)

Artinya: "... dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim..." (Q.S. Al-Imran: 57)¹¹

Upah haruslah dibayarkan sebagaimana tertuang jelas dalam surat Ali- 'Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT.

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan mengidentifikasikannya dalam *nash* (Alquran dan sunah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka

¹¹Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 57.

diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikan maka digunakan *maslahah mursalah*.¹²

Berkaitan dengan hal ini di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yang merupakan desa mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan kuli pabrik jagung atau padi. Masyarakat desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan bekerja sebagai buruh tani diantaranya, buruh tani tersebut ialah buruh tani tanam padi atau jagung maupun buruh tani panen cabai. walaupun dalam mempekerjakan buruh pemilik dalam pengupahan tidak ada transparansi kepada buruh tani tersebut, sehingga buruh tani menerima pekerjaan itu dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan pengupahan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga tidak adanya transparansi antara pekerja dengan pemberi upah. Sistem pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menimbulkan tidak kerelaan atau ikhlas pada buruh, karena upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dan akan menimbulkan kerugian antara pihak buruh dan pemberi kerja atau pemilik lahan.

¹² Mohammad Rusfi. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Al-Adal*, Vol.XII, No.1 Juni 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung), (on-line), tersedia di: https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=1528000667837168670&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DHnz-oKMNBUI (15 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat kesenjangan data teori dan praktek upah mengupah. Oleh sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGUPAH BURUH TANI TANPA AKAD DI AWAL”**.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang upah mengupah buruh tani tanpa akad di awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem upah mengupah yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹³ Dalam hal ini penulis meneliti skripsi ini dengan terjun langsung kelapangan penelitian yaitu di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala, sifat-sifat, keadaan dan situasi kelompok untuk menepatan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.¹⁴

Dalam skripsi ini penulis akan menggambarkan dengan jelas tentang upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

¹⁴ Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 1990), h. 93.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.¹⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja buruh tani berjumlah 5 orang dan penyedia pekerjaan berjumlah 5 orang.

¹⁵ Rizky Ahmad, *Penjualan konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 131.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih.¹⁹ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi di jadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²⁰ Wawancara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang praktik upah mengupah yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²¹ Mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data-data yang didapatkan dari masyarakat yang telah diwawancari di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 65.

²¹Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2007), Cet ke VIII, h. 115.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai fenomena sosial, kemudian dilakukan pencatatan.²² Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana praktek upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, lalu di olah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.
- b. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, misalnya data kependudukan, pemerintahan, dan data lainnya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang upah mengupah tanpa akad diawal. Menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan mengetahui sistem pelaksanaan pada akad upah mengupah pada masyarakat desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

Metode berfikir pada penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Melton Putra, 2011), h. 63.

mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²³ Metode ini digunakan untuk menyimpulkan secara khusus berkenaan dengan sistem akad yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil Analisis dituangkan dalam pembahasan penelitian ini.



²³Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 181.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya.²⁴

Menurut segi etimologi akad bisa berarti القدة (sambungan), العهد dan (janji).²⁵ Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman Allah SWT. Tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

(Q.S. Al-Maidah: 1)²⁶

Menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Diponegoro, 2010), h.106.

qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* (مُوجِبٌ) dan pelaku (pihak) kedua disebut *qabil* (قَابِلٌ).²⁷ Sedangkan menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁸

2. Rukun dan Syarat Akad

Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi hukum akad yang merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu:

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²⁹
- b. *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁰
- c. *Al-Ma'qud* alaih atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.³¹
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *sya'ra* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

²⁷ M Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.102-103.

²⁸ Mardani, *Loc.Cit*

²⁹ *Ibid.*, h. 72.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 47.

³¹ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Grenta Press, 2008), h. 8

- e. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut.³²

Selain rukun, syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu ialah:³³

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarat Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima rukun akad yaitu, *shighat*, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. (2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *tagrir* atau penipuan, dan *gubhn* atau penyewaan *maran*. (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu

³² Mardani, *Op.Cit.*, h. 72-73.

³³ *Ibid.*, h. 74.

barang (*taugif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

- c. Syarat berlakunya (*nafids*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

3. Macam-macam Akad

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda yaitu:

A. Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada *aqad shahih* dan *ghairu shahih*

- 1. *Aqad shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat.

Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti pada pihak-pihak yang berakad.

Aqad shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

- a) *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan

dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini muncul implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akad.

Aqad nahfis terbagi kepada: *aqad lazim* dan *aqad mauquf*

(1) *Lazim*, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan *ijarah* (sewa-menyewa dan upah mengupah). *Ghairu lazim*, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain. Mislanya akad *wakalah*, *ariyah*, dan *wadi'ah*.

Dalam kaidah fikih, dirumuskan:

الأصل في العقود اللزوم

“pada dasarnya akad itu adalah luzum (mengikat para pihak)”.³⁴

Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pada (Q.S Al-Maidah[5:1]:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.³⁵

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010),h. 56-57.

³⁵ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 106

Kepastian sifat *luzum* pada akad menurut Hanafiyah dan Malikiyah adalah dengan tetapnya akad yang bersumber dari dua orang yang berakad. Sementara itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *luzum* (mengikat para pihak) kecuali dengan berpisahnya kedua orang yang berakad atau dengan adanya *khiyar*. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis nabi tentang *khiyar* majelis:³⁶

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا³⁷

Dari ibn Umar r.a diterima dari Rasulullah Saw. ia berkata:

“apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya mempunyai hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah”.

Akad *luzum* (mengikat para pihak) terbagi pada:³⁸

(a) Akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan.

Seperti akad nikah tidak dapat dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan seperti talak dan *khulu*.

(b) Akad *lazim* (mengikat) yang dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, seperti akad jual beli, *ijarah*, *sulhu*

³⁶ Rozalinda, *Op.Cit*, h. 57.

³⁷ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami; al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 82, h. 744, hadis ke-2006.

(perdamaian), *muzara'ah*, *munaqqaqasah* (kerja sama dalam lahan pertanian) dan sejenisnya.

(c) Akad *lazim* (mengikat) terhadap satu pihak saja, seperti *khafalah rahn*. Akad ini mengikat terhadap *rahin* (pihak penggadaai) dan *kafil* (pihak penjamin).

b) *Mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayiz*. Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin wali maka akad ini batal, ini merupakan pendapat Hanafiyah. Namun akad ini batal menurut pendapat Syafi'yah dan Hanabilah.

2. *Aqad ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat) , seperti jual beli bangkai.³⁹

Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad *gharu shahih* kepada akad *batil* dan *fasid*.

a) Akad *batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang yang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwin* seperti

³⁹ Rozalinda, *Op.Cit.* h. 58.

khamar. Terhadap akad *batil*, apapun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan akad, karena akadnya dipandang tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.

- b) Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Akad *batil* dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad *fasid* terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi *mahruf tahrir*.

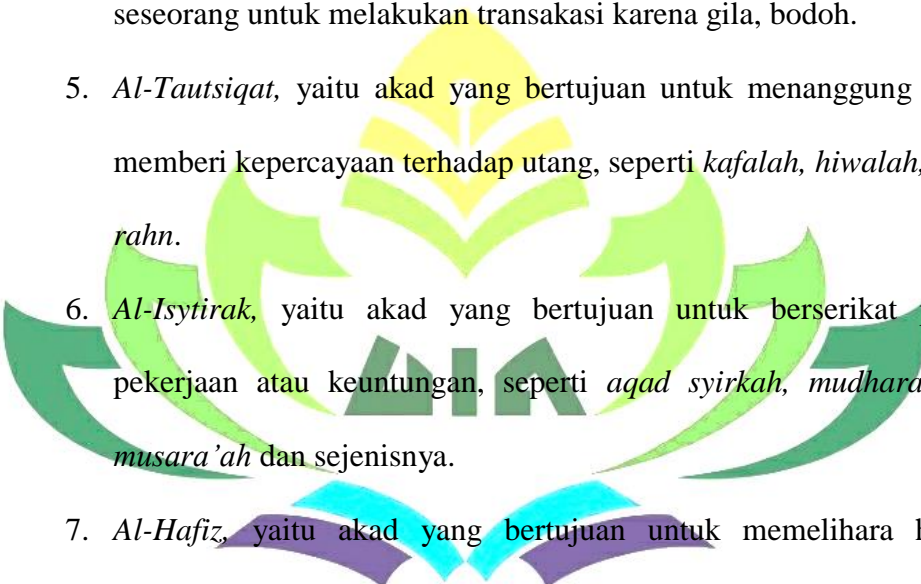
B. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi:

1. *Aqad musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syarah dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya.
2. *Aqad ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh *syar'i*, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan manusia, seperti *aqad istishna' bai' al-wafa'*.⁴⁰

C. Dilihat dari tujuan akad, akad terbagi pada:

1. *Al-Tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli, dan *ijarah*.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 59.

- 
2. *Al-Isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, seperti *thalaq* , dan pemanfaatan *qishas*.
 3. *Al-Ithlaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan pada orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti *wakalah*.
 4. *Al-Taqydat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *hajru* atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila, bodoh.
 5. *Al-Tautsiqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang, seperti *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.
 6. *Al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan, seperti *aqad syirkah*, *mudharabah*, *musara'ah* dan sejenisnya.
 7. *Al-Hafiz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya seperti *wadi'ah*.

D. Dilihat dari benda, akad terbagi:

1. *Aqad 'aniyah*, yaitu akad yang kesempurnaanya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *wadi'ah*, *rahn*, dan *qiradh*.
2. *Akad ghairu 'aniyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya *shigat* akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *aniyah*, seperti akad amanah.

E. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad, akad ini terbagi:

1. *Aqad munajaz*, yaitu akad yang bersumber dari *sighat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: “ *Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian* ” yang langsung diterima oleh pihak lain.
2. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *sighat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “ *Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan* ”.⁴¹

4. Aqad Ghairu Lisan

Pada prinsipnya akad dilakukan dengan lisan. Namun, bukan satu-satunya cara. Untuk melaksanakan akad para ulama ada beberapa cara yang bisa ditempuh diantaranya:

A. *Aqad Al-Mu'atha* atau *Ta'athiy* (saling memberi)

Akad *mu'athah* adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan ijab dan kabul. Misalnya, pembeli mengambil barang dan menyerahkan uang kepada kasir tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Hal ini banyak ditemukan dalam dunia perdagangan sekarang seperti jual beli yang dilakukan di super market, mini market, atau toko-toko swalayan lainnya.

⁴¹ *Ibid.*, h. 60.

Ulama berbeda pendapat tentang akad dengan cara *tha'athi*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, akad yang dapat dilakukan dengan cara *tha'athi* terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Baik terhadap barang yang murah, seperti telur, roti, maupun barang yang mahal, seperti rumah, mobil karena sesungguhnya kebiasaan manusia petunjuk nyata atas kerelaan. Mazhab Maliki dan pendapat yang paling kuat dari Mazhab Ahmad menyatakan, akad dapat dengan cara perbuatan atau *tha'thi* bila jelas menunjukkan kerelaan, baik telah menjadi kebiasaan maupun tidak.⁴²

Sementara itu, Syafi'iyah, Syiah dan Zahiriyah berpendapat, akad tidak dapat dilakukan dengan cara perbuatan atau *mu'athah* karena tidak kuat menunjukkan atas saling berakad sebab rela merupakan urusan tersembunyi yang tidak menjadi petunjuk atas kerelaan kecuali dengan adanya akad. Sesungguhnya, disyaratkan terjadi akad dengan lafal-lafal yang jelas atas sindiran (*sharih* dan *kinayah*) atau sesuatu yang bisa dijadikan alat ketika dibutuhkan, seperti isyarat atau tulisan. Namun, dikalangan mazhab Syafi'iyah mutaakhirin, seperti Iman Nawawi dan Imam al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara *mu'athah* adalah sah apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴³

B. *Aqad bi al-Kitabah* (Akad Dengan Tulisan)

Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu. Keduanya dapat hadir

⁴² *Ibid.*, h. 61

⁴³ *Ibid.*

pada waktu akad ataupun tidak hadir (*ghaib*) akad disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad.⁴⁴ Berdasarkan kaidah fikihiah, yaitu:

الكتابة كالخطاب⁴⁵

“Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”

Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagaimana ijab dan kabul diucapkan dengan perkataan maka ijab kabul dengan surat menyurat, seperti yang sudah berlaku pada zaman sekarang, seperti transaksi via pos, telegram, e-mail, dan sebagainya sah dilakukan.

Akan tetapi, akad perkawinan tidak sah diadakan dengan tulisan baik kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wali perempuan) hadir maupun tidak hadir kecuali bila salah satu pihak tidak mampu berbicara seperti bisu. Karena syarat sah perkawinan dihindari oleh para saksi, mereka harus, menyaksikan dan mendengarkan pembicara kedua belah pihak.

C. *Aqad bi' al-Isyarat* (Akad dengan Isyarat)

Isyarat adakalanya dari seseorang yang mampu berbicara dan berasal dari orang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara maka yang melakukan akad dengan isyarat tidak sah, tetapi wajib dengan lisan atau tulisan karena walaupun isyarat menunjukkan kehendak, tetapi ia tidak menfaedahkan suatu keyakinan seperti lafaz

⁴⁴ *Ibid.*, h. 55.

⁴⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) Jilid 1-3, Pasal 96, h. 85.

dan tulisan. Apabila orang yang berakad tidak dapat berbicara, seperti bisu atau gagap, jika tulisannya baik harus dengan tulisan, begitu riwayat yang kuat dari golongan Hanafiyah karena tulisan lebih menunjukkan pengertian yang dalam dari pada isyarat. Jika tulisannya tidak baik, dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama nilainya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para fuqaha' karena darurat,⁴⁶ sesuai dengan kaidah fikiyah:

الإشارات مشهورة للأخرس كالبيان باللسان⁴⁷

“Isyarat yang telah masyhur dari orang bisu dari penjelasan dengan lisan”.

5. Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kedailan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.⁴⁸ Namun ada asas yang utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*.⁴⁹ Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah SWT serta bertujuan akhir untuk Allah SWT.⁵⁰ Penjelasan asas-asas dalam Islam yaitu:

a. Asas Illahiah

Kegiatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Manusia memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Tanggung

⁴⁶ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 55-56.

⁴⁷ Ali Haidar, *Op.Cit.*, Pasal 69-70, h. 61-62.

⁴⁸ Mardani, *Op.Cit.*, h. 91.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005), h. 30.

⁵⁰ A.M Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), h. 125-126.

jawab pada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Ketika manusia hendak bermuamalah (membeli, dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), dia selalu berdiri dibatas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap-menyuap. Ia menjahui daerah yang diharamkan Allah, dan meninggalkan daerah syuhbat.⁵¹

Asas *ilahiah*, menurut Izzan dan Syahri Tanjung di bagi kepada dua bagian, yakni *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid Uluhiyah* yaitu keyakinan atas keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan dilangit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.⁵²

a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan

⁵¹ Mardani, *Op.Cit.*, h. 92.

⁵² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238.

pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yakni QS. *Al-Baqarah*/2: 265; *al-Maidah*/5: 1; *al-Hijr*/15: 2; *ar-Rum*/30: 95; *an-Nisaa*’/4: 33;72.⁵³

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. *An-Nahl* (16): 71,



Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

c. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam Qs. *AL-hadid* (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

⁵³ *Ibid.*

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. QS. *Al-Maidah* (5): 8, disebutkan berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁵⁴.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu perumamaan. Menurut Dr. Yusuf Alqardhawi, keadilan adalah keseimbangan, antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan

⁵⁴ *Ibid.*, h. 93-94.

masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berdasarkan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya⁵⁵. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 177 berikut ini:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“... dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.

Dan juga dalam QS. *al-Mu'minuun* (23): 8-11 berikut ini.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ
تُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١١﴾

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya'ni) yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal didalamnya”.

Dalam QS. *an-Nahl* (16): 90, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, cet. 1, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”.

Sikap adil harus selalu tercemin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya.

Yusuf Qardhawi, berpendapat sebagai berikut.⁵⁶

“Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi”.

Mereka yang menakar dan menimbang, dengan tidak adil mendapat ancaman dari Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. *al-Muthaffifin* (83): 1-6 berikut ini.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk

⁵⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h. 94.

orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia menghadap Tuhan semua alam”.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Dalam QS. *an-Nisaa'* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari QS. *an-Nisaa'* (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam suatu melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat

membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan ikhtikad baik dari para pihak.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. dalam QS. *al-Ahzab* (33): 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar”.

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan-perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

e. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam QS. *al-Baqarah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya

tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁵⁷

Menurut Hukum Ekonomi Syariah,⁵⁸ bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. *Iktiyari*/Sukarela
2. Amanah/menepati janji
3. *Ikhtiyati*/kehati-hatian
4. *Luzum*/tidak berubah
5. Saling menguntungkan
6. *Taswiyah*/kesetaraan
7. Transparansi
8. Kemampuan
9. *Taisir*/kemudahan
10. Iktikad baik
11. Sebab yang halal.⁵⁹



6. Berakhirnya akad

A. Berakhirnya Akad dengan *fasakh*

Yang dimaksud adanya pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “mehilangkan atau menghapuskan hukum secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.” Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali kestatus semula sebelum kontrak terjadi. Demikian, objek kontrak.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 98.

⁵⁹ *Ibid.*, h.98-99.

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jaiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dengan rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*mushlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar*, (bahaya, kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti *iqalah*.⁶⁰

a. Akad yang tidak lazim (*Jaiz*)

Yang dimaksud tidak lazim (*Jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad yang membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, akad tidak terikat hak orang lain. Tetapi jika ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan maka tidak boleh *difasakh*.⁶¹

Kebalikan dari akad *jaiz* adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad.

Akad tidak lazim itu adakalanya bagi kedua seluruh pihak akad dan adakalanya bagi salah satu pihak akad.

⁶⁰ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah 'Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 186.

⁶¹ *Ibid.*, h. 187.

Pihak yang punya kewajiban menjadi lazim dan tidak wajib melaksanakan akad dan tidak boleh mundur.

Jadi dengan akad tidak lazim, maka terbuka bagi pihak akad untuk mem-fasakh atau membatalkan akad. Jika memilih *fasakh*, maka akadnya berakhir.

b. Khiyar

Akad-akad seperti *bai'* dan *ijarah* bisa di *fasakh* dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyar* ini timbul karena *ijab qabul* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad.

Bagi pihak yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.

Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib* (*khiyar* disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak). Setelah objek kontrak diterima. Menurut Hanafiyah, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau putusan hakim.

Disebabkan dalam *al-tanfidz* yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak yang tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak boleh *fasakh*. Misalnya dalam kontrak yang mengandung *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran).

c. Iqalah

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad yang memutuskan akad yang telah disepakati.

Biasanya akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridho kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridha mereka.

Jadi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

d. ‘*Uyub* Ridha (Cacat Ridha)

Akad bisa juga *difasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh*, maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar ‘aib*).

e. Syarat dan sebab *fasakh*

Sebuah kontrak dapat dilakukan *fasakh* apabila telah terpenuhi syarat syarat berikut:⁶²

- 1) Kontrak yang akan *difasakh* harus mengikat kedua belah pihak, yaitu kontak yang berbentuk pertukaran (*mu’awadah*).
- 2) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan

⁶² Mardani, *Op.Cit.*, h. 74.

berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar *fasakh*, diputuskan.

- 3) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi *ghalath* (kekeliruan), *ikrah* (pemaksaan) dan *tadlis* (penipuan), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak *difasakh* baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.

B. Berakhirnya Akad dengan *Infisakh*

Infisakh, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum) sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfudz*) disebabkan *afad samawiyah* (force majeure).

a. Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang dalam akad wakalah.

Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

b. Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada

pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.⁶³

c. Pelaku Akad Meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

d. Akad yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.

C. Akibat Hukum Terhadap Akad

Secara umum, Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bahwa kaidah yang berlaku dalam *fasakh* yakni:

- a. Jika *infisakh* dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan seperti sebelum terjadi akad.
- b. Jika terjadi *infisakh* dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan akadnya.

Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Kontrak menjadi berakhir. Sebelum *fasakh* terjadi, kontrak dan semua akibat hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.
- b. *Fasakh* menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut dan yang berlaku kedepan. Yang pertama terjadi dalam *fasakh* terhadap kontrak yang bersifat *fauriyah*, yakni kontrak pertukaran dimana objek

⁶³ *Ibid.*, h. 89.

kontrak yang dipertukarkan sudah diserahterimakan pada kontrak terjadi, misalnya kontrak jual beli.

- c. Sedangkan akibat hukum yang kedua, yakni yang berlaku ke depan, terjadi dalam *fasakh* terhadap kontrak yang bersifat *mustamirrah*, yakni kontrak dimana objek kontrak tidak diterima pada saat kontrak atau pelaksanaan kewajiban kontraknya memerlukan waktu; seperti kontrak sewa (*ijarah*) dan *syirkah* (kerja sama).⁶⁴

B. Ujrah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Ujrah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أجر - يأجر* (*ajara - ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.⁶⁵

Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁶⁶

Menurut pengertian lainnya upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶⁷ Adapun pengertian diatas ada beberapa definisi ijarah menurut para ulama:⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*, h. 90-92.

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 101.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 101.

⁶⁷ Khumedi jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.141.

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

- b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَدَّلَةٍ قَائِلَةٍ بِالْبَدْلِ وَلَا لِإِبَاحَةٍ بِعَوَضٍ
مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat, bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَدَّلَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.⁶⁹

1. Dasar Hukum Upah (Ijarah)

Memberikan upah kepada pekerja yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan hukumnya adalah boleh. Dasar hukum yang membolehkan adalah Firman Allah dan Rasul-Nya.

- a. Landasan Al-Qur'an

Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

⁶⁹ Ibid.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Zz-Zukhruf:32)⁷⁰

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah SWT telah mengatur semua penghidupan hamba-hambanya sedemikian rupa, anjuran bagi semua hamba-hambanya dapat selalu bersyukur kepadanya dan mempergunakan dengan baik yang telah Allah SWT beri. Karena Allah SWT lah Tuhan yang selalu tahu apa yang diinginkan hambanya.

Yang terdapat pada surah At-Thalaq ayat 6:



فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى

Artinya:”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan.”(Q.S. At-Thalaq: 6)⁷¹

Dalam surat At-Thalaq ayat 6: Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar membayar upah menyusui kepada ibunya yang telah diceraikan.

Surat Al-Imran ayat57:

⁷⁰ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 491.

⁷¹ *Ibid.*, h. 591.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:”Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Imran: 57)⁷²

Upah yang dibayarkan kepada pekerja haruslah dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan dalam surat Al-Imran ayat 57. Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja haruslah diberi upah, apabila tidak memenuhi upah maka itu suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah SWT.

Surat Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan

⁷² Ibid., h. 57.

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)⁷³

Ayat diatas menegaskan bahwasanya penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁷⁴

Surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

⁷³ Ibid., h. 37.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 561

تَأْجُرْنِي تَمَنِّي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

Artinya:” salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.” (Q.S. Al-Qashash: 26-27)⁷⁵

b. Landasan Sunnah

Dasar hukum upah, selain didalam firman Allah SWT dasar hukum upah juga tertuang dalam beberapa hadist. Diantaranya ialah:

مَنْ طَرِيقَ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ ابْنِ أَبِي
سَعِيدٍ, قَالَ: إِذَا سَتَّاجَرْتَ أَجِيرًا فَاعْلَمْهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي)⁷⁶

Artinya: “Dari keterangan, Ibnu Mubarak, dari Su’bah, dari Hamad, dari Ibn’ Said, Berkata: Apabila kamu memberi upah kepada pengupah maka beritahulah upahnya.” (H.R. An-Nasai)”.

Menurut hadis di atas menerangkan bahwa sehendaknya pada saat mempekerjakan buruh atau pekerja lebih baik diberi tahu berapa besar nilai upah yang akan didapatkan oleh pekerja.

Demikian juga dalam pemberian upah mengupah sebaiknya harus diberitahukan secara jelas dan juga diberitahukan berapa besar upah

⁷⁵ Ibid., h. 388.

⁷⁶ Kitab Bulughul Al-Maroon Min Adiatil Ahkam, h. 257.

yang akan diberikan kepada pekerja. Seperti halnya yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)⁷⁷

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazzaq).

Mengenai waktu pembayaran upah dapat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti halnya sabda Rasulullah mengenai upah yang sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

c. Landasan Ijma'

Pada masa sahabat sudah berijma', menyatakan bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi kehidupan manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan ini menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat atas kesepakatan ini dan tidak ada seorangpun yang membantahnya. Kesepakatan ini ialah kesepakatan ijma' tentang ijarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa, umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para ijma' para ulama ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran

⁷⁷ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, t,th), h.189.

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut.⁷⁸

Menurut Ibnu Rasyd pada kitab Bidayah Al-Mujtahid mengatakan bahwa, ‘’sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha pada masa pertama’’.⁷⁹ Al-Ijarah adalah merupakan ‘’pemindahan hak guna atas barang tahu jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁸⁰

2. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:⁸¹

- 1) *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna jasa. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif 1987), h. 18.

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h. 165.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

⁸¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105.

baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

3) Objek akad *ijarah*; yaitu:

- a) Manfat barang dan sewa; atau
- b) Manfaat jasa dan upah. Upah atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

a. Syarat-syarat Ujrah

Syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, (*syurut al-in 'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syarat al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Antara lain,⁸² yakni:

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak disyaratkan *mummayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyis* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementra *baligh* adalah syarat

⁸² *Ibid.*, h. 106.

bagi berlakunya akibat hukum (*ijarah syuruh al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.⁸³

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah*, akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.⁸⁴

Ketiga, syarat sah (*syurut al-shhihah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut:

- 1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: ‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.’’

- 2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

b) Penjelasan waktu kerja , tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

c) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

d) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh, yaitu:

(1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.

(2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.

(3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai

(4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.

(5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya,

sewa macam ini tidak sah termasuk dalam pengecualian syarat ini sewa jasa menyusui, karena darurat dalam hadanah.

(6) Manfaat dapat diserahkan terimakan.

(7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.⁸⁵

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

2) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.⁸⁶

3. Macam-macam Ujrah

Macam-macam ujrah dapat diklarifikasikan terbagi dua macam yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 107-109.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 110.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁸⁷

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa) *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perusahaan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang *dibolehkan syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *figh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁸⁸

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama *figh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh, pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini, ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Keduanya bentuk *al-ijarah* terhadap bentuk pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu, menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh. upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ala' al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

237. ⁸⁷ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 2007), h.

⁸⁸ *Ibid.*

a. Ijarah Khusus

b. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

c. Ijarah Mussytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁸⁹

4. Sistem Pembayaran Ujrah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁹⁰

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat.⁹¹

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 238.

⁹⁰ Hendi suhendi, *Op.Cit.*, h.121.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 5.

- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau mengangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.⁹²

5. Berakhirnya akad Ujrah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijrah akan berakhir apabila:⁹³

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

⁹² *Ibid.*, h. 26.

⁹³ Nasroen Haroen, *Op.Cit.*, h. 237.

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda banjir.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sidoharjo

1. Sejarah Desa Sidoharjo

Berdasarkan fakta sejarah yang bersumber dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan (putra-putri transmigrasi) tepatnya pada tahun 1960 Sidoharjo masih merupakan daerah hutan belantara yang masih dihuni para satwa liar seperti gajah, harimau, ular dan lain-lainnya.

Adanya kondisi daerah yang masih demikian maka banyak warga transmigrasi yang tidak kerasan dan meninggalkan Desa ini namun bagi warga yang tabah mereka tetap bertahan sekalipun dengan kondisi yang demikian rupa. Lebih parah lagi pada tahun 1970 Sidoharjo khususnya dan Lampung pada umumnya terjadi peceklik yang cukup parah sehingga banyak warga yang menderita kelaparan dan mereka mengonsumsi gombong atau onggok yaitu singkong yang sudah diolah oleh pabrik dan diambil acinya.

Sidoharjo kini merupakan Desa yang berpotensi untuk dijadikan areal pertanian yang kondisi tanahnya cukup subur dan merupakan daerah transmigrasi yang nama dusun-dusunnya banyak menggunakan nama daerah asal seperti: Kediri, Jogja, Surabaya, Semarang dan lain sebagainya. Hingga saat ini Desa Sidoharjo memiliki XII (dua belas) Dusun yaitu:

- a. Dusun I diberi nama Solo
- b. Dusun II diberi nama Kediri

- c. Dusun III diberi nama Bandung
- d. Dusun IV diberi nama Surabaya
- e. Dusun V diberi nama Jogja
- f. Dusun VI diberi nama Semarang
- g. Dusun VII diberi nama Bali Sido A
- h. Dusun VIII diberi nama Sidomukti
- i. Dusun IX diberi nama Sidolaras
- j. Dusun X diberi nama Rejomulyo
- k. Dusun XI diberi nama Sidorahayu
- l. Dusun XII diberi nama Pasar

Desa Sidoharjo disamping memiliki XII Dusun, di tiap-tiap dusun terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Desa Sidoharjo ada 43 (empat puluh tiga) RT, yang tersebar di masing-masing dusun, yakni:

- a. Dusun Solo ada 6 RT
- b. Dusun Kediri ada 3 RT
- c. Dusun Bandung ada 2 RT
- d. Dusun Surabaya ada 3 RT
- e. Dusun Jogja ada 4 RT
- f. Dusun Semarang ada 4 RT
- g. Dusun Bali Sido A ada 5 RT
- h. Dusun Sidomukti ada 4 RT
- i. Dusun Sidolaras ada 4 RT
- j. Dusun Rejomulyo ada 3 RT
- k. Dusun Sidorahayu ada 2 RT

1. Dusun Pasar 2 RT

2. Keadaan Demografis Desa Sidoharjo

1) Batas Wilayah Kampung

Letak geografi Desa Sidoharjo, terletak diantara:

- a) Sebelah Utara : Sidoreno
- b) Sebelah Selatan : Sidowaluyo
- c) Sebelah Barat : Sidowaluyo
- d) Sebelah Timur : Sidomakmur

2) Luas Wilaya Desa

- a) Pemukiman : -
- b) Tanah Sawah : 817,5 ha
- c) Tanah Kering : 240 ha
- d) Jalan : 24, 5 km
- e) Tanah perkebunan : 9 ha
- f) Tanah keperluan fasilitas umum : 5 ha
- g) Tanah keperluan fasilitas sosial : 9,75 ha

3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a) Jumlah kepala keluarga KK : 2.739 KK
- b) Jumlah laki-laki : 4.759 orang
- c) Jumlah perempuan : 4.762 orang

Jadi jumlah keseluruhan adalah 14260 Jiwa.

Tabel 1

**Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo kecamatan Way Panji Lampung Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikannya**

NO	Status Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	895 orang
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	1.052 orang
3.	Tamat SD Sederajat	3.791 orang
4.	Tamat SLTP Sederajat	2.083 orang
5.	Tamat SLTA Sederajat	1.093 orang
6.	Tamat Akademi Sederajat	83 orang
7.	Tamat perguruan Tinggi Sederajat	99 orang
8.	Buta Huruf	425 orang

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015)

Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya penduduk di Desa Sidoharjo sudah memiliki pengetahuan dalam pendidikan serta memiliki keilmuan yang dapat berdaya saing dengan desa-desa lainnya dan tentunya dapat menjadi pendorong kemajuan perekonomian khususnya di Desa Sidoharjo, serta dapat berdaya saing dengan desa kecamatan lainnya. Untuk melihat jumlah penduduk Desa Sidoharjo menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikutnya, yaitu:

Tabel 2

**Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan
Berdasarkan Jenis PekerjaanJ**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.350 orang
2.	Nelayan	-
3.	Pengusaha Sedang	-
4.	Pengerajin/ Industri Kecil	207 orang
5.	Buruh Industri	231 orang
6.	Buruh Bangunan	1.527 orang
7.	Buruh Pertambangan	-
8.	Buruh Perkebunan	-
9.	Pedagang	275 orang
10.	Pengangkutan	57 orang
11.	Pegawai Negeri Sipil	52 orang
12.	ABRI	2 orang
13.	Pensiunan (ABRI/PNS)	23 orang
14.	Peternak	231 orang

(sumber Data monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015)

Data di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih banyak di Desa Sidoharjo bermata pencaharian petani dan buruh bangunan. Sebab itu masyarakat di Desa Sidoharjo dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sebagai petani dan buruh bangunan.

Tabel 3

**Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan Desa Sidoharjo
Kecamatan Way Panji Lampung Selatan**

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.853 orang
2.	Khatolik	381 orang
3.	Kristen/Protestan	547 orang
4.	Hindu	1.010 orang
5.	Budha	-

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2015)

3. Struktur Organisasi Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo memiliki aparat Desa yang kuat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Adapun kepengurusan Aparat Desa antara lain:

- 1) Kepala Desa : Marjana
- 2) Sekertaris Desa : Titik Handayani
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan : Priyo Heri H
- 4) Kepala Seksi Pelayanan : Dyah Anggraini
- 5) Kepala Seksi Kesejahteraan : M Arif P
- 6) Kepala Urusan Tata Usaha : Krisna Nova
- 7) Kepala Urusan Keuangan : Devi H

8) Kepala Urusan Perencanaan : Darminto

Kepala dusun:

1) Dusun Solo : Yuratmin

2) Dusun Kediri : Marijo

3) Dusun Bandung : Suwarno

4) Dusun Surabaya : Ngatio

5) Dusun Jogja : Sumarno

6) Dusun Semarang : Wahyudi

7) Dusun Bali Sido A : Wayan Subagio

8) Dusun Sidomukti : Sukamto

9) Dusun Sidolaras : Edi Subowo

10) Dusun Rejomulyo : Wito

11) Dusun Sidorahayu: Supriyadi

12) Dusun Pasar : Sudarno

Lembaga-lembaga kemasyarakatan/sosial antara lain:

1) Kelompok Pengajian

2) Kelompok Tani

3) PKK

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Mengupah Tanpa Akad di Awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang tanahnya cukup subur dan Desa Sidoharjo yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, maupun buruh bangunan. Masyarakat di Desa Sidoharjo cukup banyak masyarakatnya masih dalam kondisi ekonominya menengah kebawah. Dengan hasil pendapatan perbulan dengan rata-rata Rp. 600.000/bulan- Rp. 800.000/bulan. Pendapatan ini tentunya dianggap kurang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam satu bulan, sebab pekerjaan menjadi buruh tani tidak setiap hari, karena menjadi buruh tani adalah sebuah pekerjaan yang pada saat dibutuhkan saja. Misalnya untuk menanam dan memanen.⁹⁴ Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar mereka menjadi buruh tani. Praktik pembayaran upah mengupah tanpa akad di awal biasanya dilakukan oleh pekerja buruh tani yang diminta untuk bekerja oleh pemilik lahan atau orang yang memperkerjakannya.⁹⁵

Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam bersesepakat timbulah hak dan kewajiban antara mereka. Bagi masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan upah mengupah tidak awam lagi sebab pekerjaan mereka sebagai buruh tani.

⁹⁴ Yeni Fitriani, Warga Desa Sidoharjo, Wawancara, tanggal 15 Febuari 2019

⁹⁵ Sujiati, Warga Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 15 Febuari 2019

Sistem upah mengupah yang terdapat pada Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung tidak adanya kesepakatan upah pada awal mempekerjakan. Upah yang diberikan adalah upah harian dan setelah pekerjaan tersebut selesai.

Praktek upah-mengupah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan menggunakan sistem tradisional atau kebiasaan warga Desa Sidoharjo yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni yang dimaksud kesepakatan buruh tani mau untuk bekerja pada pemilik lahan.

Perjanjian upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga khususnya masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dari upah pemilik lahan (pemberi upah) kepada buruh tani. Dengan mengikuti adat kebiasaan mempekerjakan buruh tani tanpa adanya pemberitahuan upah dari awal.

Berikut ini contoh pelaksanaan, yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan menurut bapak Mahroji sebagai pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh tani untuk mengerjakan salah satu lahan miliknya tepatnya untuk memberi pupuk atau obat tanaman untuk tanaman padi yang telah ia tanam. Tetapi pada saat memberi pekerjaan kepada buruh tani (pada saat itu buruh tani bernama Hadi), namun pada saat memperkerjakan buruh tani itu bapak Mahroji hanya memberi pekerjaan tanpa adanya kesepakatan upah.⁹⁶ Memang sering bapak Hadi menerima pekerjaan buruh tani seperti memupuk ataupun menyemprot tanaman yang diberikan oleh pemberi jasa.⁹⁷

⁹⁶ Mahroji, Pemilik Lahan Sawah Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun 2019

⁹⁷ Hadi, Buruh Sawah Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun 2019

Selanjutnya contoh pengupahan yang dilakukan antara Ibu Ani dengan Ibu Sutini yaitu menggunakan sistem pembayaran upah mengupah tanpa akad diawal, yang dimana pada saat itu Ibu Ani bekerja di lahan Ibu Sutini, yang dimana lahan Ibu Sutini lumayan jauh dari rumah Ibu Ani, dikarenakan pada saat itu mencari pekerja buruh tani lumayan sulit, sebab pada saat itu adalah masa panen.⁹⁸ Meskipun rumahnya Ibu Ani jauh dengan tempat ia bekerja, antara Ibu Ani sebagai buruh dan Ibu Sutini pemberi pekerjaan saling percaya antara kedua belah pihak. dalam bekerja Ibu Ani memang orangnya sangat pekerja keras dan sangat cekatan, oleh sebab itu saya puas dengan hasil kerjanya yang cepat.⁹⁹

Terdapat juga upah mengupah tanpa akad diawal yang dilakukan antara Bapak Sahroni dengan Bapak Lasmun. Bapak Lasmun mempekerjakan Bapak Sahroni diminta untuk membawa peralatan alat-alat pertanian di lahan pak Lasmun, sebab lahan pak Lasmun cukup jauh.¹⁰⁰ Sehingga membutuhkan biaya seperti bensin untuk membawa peralatan tersebut, dan tidak adanya biaya transportasi. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial diantara kedua belah pihak tersebut.¹⁰¹

Menurut Bapak Hariyanto, menurutnya pelaksanaan upah-mengupah yang dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampug Selatan sudah terjadi sejak lama dan tak dipungkiri juga terdapat tidak adanya saling keridhan antara kedua belah pihak. Baik pihak buruh maupun pihak pemberi pekerjaan, namun tak

⁹⁸ Sutini, Pemilik Sawah Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun 2019

⁹⁹ Ani, Pekerja atau buruh, Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun 2019

¹⁰⁰ Lasmun, Pemilik Sawah Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun 2019

¹⁰¹ Sahroni, Pekerja atau buruh Desa Sidoharjo Wawancara, Tanggal 12 Febuari Tahun

banyak pula sudah terbiasa dan ridha dengan sistem pengupahan yang sudah sejak lama terjadi di Desa Sidoharjo, sebab upah yang didapat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah biasanya diberikan setelah selesai pekerjaan tersebut, sebab biasanya upah yang diberikan adalah upah harian, biasanya untuk upah perharinya Rp. 40.000 – Rp 45.000 dan itu tergantung pemilik lahan. Upah antara laki-laki dan perempuan pun dibedakan, apabila laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan sebab tenaga laki-laki lebih kuat. Karena yang terpenting adalah upah yang didapat sesuai dengan hasil kerjanya.¹⁰²

Kemungkinan dampak ialah tanpa adanya kesepakatan dari awal antara pemilik lahan dengan buruh tani akan terjadinya tidak keridhoan pada saat buruh mendapatkan upah yang diberikan tergantung pada pemilik lahan, karena pemberi pekerjaan (mu'ajir) memberikan upah dengan inisiatif mereka. Meskipun upah yang diberikan telah mengikuti pasaran, sebab itu mengikuti pasaran tak dipungkiri terdapat pemilik lahan yang tidak mengikuti pasaran, karena menjadi buruh tani adalah sebagai salah satu pekerjaan untuk menyambung kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya.¹⁰³

Sesudah melakukan wawancara kepada para responden yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, ternyata antara pemilik lahan dengan buruh tani pada saat mempekerjakan tidak adanya kesepakatan yang jelas. Tata cara yang dipakai masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan menggunakan sistem adat kebiasaan yang ada, dan juga tidak

¹⁰² Haryanto, Sesepuh Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Februari Tahun 2019.

¹⁰³ Ngarpani, Sesepuh Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 12 Februari Tahun 2019

adanya pengawasan dari pemilik lahan karena antara pemilik lahan dengan buruh tani didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Sitem Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngarpani dan Haryanto salah satu dari Sesepuh yang terdapat di Desa Sidoharjo, dan masyarakat setempat. Pada dasarnya sistem upah mengupah tanpa akad diawal merupakan salah satu bentuk adat kebiasaan yang terdapat di Desa Sidoharjo kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Dasarnya upah mengupah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan pihak buruh. Karena dalam menyelesaikan pekerjaanya, pemilik lahan tidak dapat menyelesaikannya sendirian, karena membutuhkan tenaga orang lain untuk membantunya.

Upah merupakan salah satu aspek penting untuk terpenuhinya kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang menjadi buruh melihat upah adalah sebuah sumber penghidupan bagi keluarganya dan disisi lain upah merupakan sebuah biaya produksi yang harus dikeluarkan. Upah juga salah satu aspek yang sangat sensitif di dalam hubungan pekerjaan, sistem pembayaran upah yang sudah lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Tradisi ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang harus dihormati oleh masyarakat seperti nilai tolong-menolong sebab manusia diciptakan untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nilai sosial tolong menolonglah ini jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial, sebab dalam prakteknya juga terdapat ketidakjujuran dalam tolong menolong.

Para pihak yang melakukan pembayaran upah ini ialah pihak yang melakukan kerjasama ini yaitu pemberi kerja (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*). Pembayaran upah yang dilaksanakan dengan adanya tanpa akad diawal, yang dimana pihak *mu'ajir* memberi pekerjaan kepada *musta'jir* (buruh tani). Pembayaran yang terdapat di Desa Sidoharjo ini menggunakan sistem harian buruh lepas merupakan, sistem harian dimana pihak buruh tidak dikasih makanan pada saat pekerjaan. Sistem pembayaran antara buruh laki-laki dan perempuanpun berbeda sebab, tenaga laki-laki dan perempuan sangat berbeda, pembayaran yang dilakukan biasanya pihak *mu'ajir* memberikan upah setelah selesainya pekerjaan tersebut, dan upah biasanya diberikan untuk perharinya ialah sekitaran Rp. 40.000.- Rp. 45. 000 perhari, itupun tergantung pemilik lahan memberikan, jadi dalam maslah ini pihak pekerja tidak tahu berapa upah yang akan dia terima. meskipun besaran upah tidak diberitahukan diawal akad, tentu saja dalam sistem pembayaran upah seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak rela dari pihak *musta'jir* (buruh tani). Karena mereka tidak tahu jelas berepa nominal upah yang akan dia terima dan berapa luas tanah yang akan dia kerjakan, maka dari itu yang dikhawatirkan akan menimbulkan tidak rela atas upah yang diterima.

Masyarakat Desa Sidoharjo melakukan upah-mengupah dengan cara seperti, tidak adanya sebuah perjanjian sebelum mengerjakan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh *mu'ajir*. Upah mengupah ini biasanya tidak ada perjanjian tertulis, dalam upah-mengupah ini biasanya hanya menggunakan lisan anantara kedua belah pihak, namun dikhawatirkan pada setelah pemberian upah pihak buruh tidak terima atau rela terhadap upah yang telah diberikan *mu'ajir* (pemilik lahan). Upah-mengupah ini dalam penyebutan akad tidak diperjelas secara jelas hak-hak

dan kewajiban baik pihak *mu'ajir* maupun pihak *musta'jir*. Tentu dalam sistem kerjasama ini akan berdampak kurang maksimal terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para buruh, dan juga pihak pemberi pekerjaan tidak setiap waktu melihat atau memandori pekerjaan buruh tersebut.

Akad upah-mengupah ini yang dilakukan antara *mu'ajir* dengan *musta'jir* tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja bahwa *musta'jir* harus melakukan pekerjaannya dengan baik atau maksimal. Hal ini dikarenakan tanpa adanya akad diawal atau perjanjian kerja antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak buruh, untuk buruh bekerja dengan rapi dan tahu nominal upah yang diberikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan

Allah telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong menolong antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Allah SWT mengatur semua perbuatan makhluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya, dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam koridor-koridor hukum yang Allah SWT buat. Kegiatan sosial seperti tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah. Prinsip muamalah ialah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam bermuamalah manusia haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan di dalam koridor-koridor hukum Islam yang disebut Fiqh Muamalah. Sebab fiqh

muamalah merupakan sebuah hasil penggalian hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama.

Mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yaitu upah-mengupah atau yang disebut dalam hukum Islam yakni *Ijarah*. *Ijarah* (upah-mengupah) merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* (buruh/pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah ia lakukan atau kerjakan.

Menurut hukum Islam, fiqh muamalah *ijarah* ini dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala al-a'mal* yakni jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkan sebab upah mengupah ini yang biasanya dilakukan dilakukan seperti menjahit baju, membangun rumah, buru, dan lain-lain. Upah-mengupah ini memang harus diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudhorotan antara kedua belah pihak. menurut hukum Islam, pekerja atau buruh disebut dengan *musta'jir* yakni orang yang mempunyai keahlian, tenaga kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya. Sedangkan *mu'ajir* adalah orang yang memberi pekerjaan atau upah. *Musta'jir* dengan *mu'ajir* telah memenuhi syarat yakni, sudah *baligh*, berakal dan bercakap dalam melakukan suatu perikatan atau kerjasama dan dapat (mengendalikan harta). Karena dalam melaksanakan *ijarah* ini harus saling meridhai antara *mu'ajir* dengan *musta'jir*.

Fiqh mu'amalah, upah atau ijarah dapat diklarifikasikan dua macam, yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) dan upah yang sepadan (*ajrun mistli*). *Ajrun musammah* (upah yang telah disebutkan) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya, pada saat ketika upah disebutkan harus disertai kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Menurut pengertian tersebut dalam pengupahan ini pihak *mu'ajir* tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Memberikan upah yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan dan sebagaimana pihak *mu'ajir* tidak diperbolehkan mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disepakati, karena upah yang telah disepakati tersebut adalah upah yang sesuai dengan ketentuan syara'. Jika upah tersebut disebutkan pada saat sebelum pekerjaan itu dimulai maka upah tersebut dinamakan upah *ajrun musammah* (upah yang telah disebutkan). Jika dalam upah-mengupah tersebut telah disebutkan besaran upah dengan jelas dan apabila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, maka dalam pengupahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengupahan sepadan (*ajrun mistli*).

Upah sepadan atau yang disebut dengan *ujrah al-mistli* merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja), jika akad *ijarah* telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya), yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati antara pihak *mu'ajir* (pemberi pekerjaan/jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) maka pada saat melakukan upah mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun praktek upah-mengupah yang terdapat di Desa Sidoharjo menggunakan sistem pengupahan yang sejak dulu. Tanpa adanya kejelasan atau kisaran nilai upah yang akan diberikan, pada praktek upah mengupah ini adanya

saling ridha dan kerelaan antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) maupun dengan *musta'jir* (penerima jasa). Karena memang pihak *mu'ajir* (penerima jasa) membutuhkan suatu pekerjaan, sebab dalam pekerjaan tersebut sangat membantu kebutuhan hidup sehari-harinya. Upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidoharjo merupakan atas dasar saling tolong menolong, meskipun tanpa adanya kejelasan atau akad di awal. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Sistem pengupahan tanpa adanya akad di awal dan adanya kesepakatan dan ialah hal yang sudah terjadi sejak lama dan menjadi salah satu kebiasaan yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.

Berdasarkan penelitian, yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Sidoharjo tentang sistem pengupahan yang sudah terjadi sejak lama dan menjadi salah satu kebiasaan dalam masyarakat. Mereka mengatakan bahwa mereka ridha dan rela untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya kesepakatan maupun kontrak kerja, atau tanpa adanya penyebutan dalam nilai upah yang akan ia dapatkan setelah melakukan pekerjaan yang ia terima. Karena mereka bersyukur atas pemberian pekerjaan, namun memang tidak dipungkiri terdapat *musta'jir*

(pemberi jasa) kurang perhatian, namun tidak mengurangi rasa kepercayaan untuk bekerja dengan baik ataupun bersyukur atas apa yang ia dapatkan.

Prakteknya pengupahan memang pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) memerintahkan kepada *musta'jir* (penerima jasa) untuk berkerja dilahan *mu'ajir* (pemberi jasa). Setelah selesai melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh *mu'ajir*, *musta'jir* mendapatkan upah yang telah diberikan oleh *mu'ajir* (pemberi jasa).

Terpenting lagi bawasannya ialah dalam pemberian upah untuk *musta'jir* (penerima jasa), sudah menjadi keharusan bagi pihak *mu'ajir* (pemberi jasa), agar tidak menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa).

Bila disuatu daerah tertentu ada sebuah tradisi seperti kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan selama perbuatan itu tidak menyalahi syara' dan merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan sebab kebiasaan itu sudah terjadi di daerah tersebut.

Pembayaran upah yang telah terdapat di Desa Sidoharjo merupakan salah satu praktek muamalah yang sejak lama menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Sidoharjo, sehingga dalam praktek pengupahan ini sudah diketahui antara kedua belah pihak. antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan pihak *musta'jir* (penerima jasa), karena dalam sistem pengupahan ini antara kedua belah pihak sudah saling rela dan ridho.

Mengenai pengupahan tanpa akad diawal yang terdapat di Desa Sidoharjo sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat sejak dulu. Menurut pandangan

Islam mengenai Ijarah dalam sistem pengupahan, besarnya upah pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri Radh'yallahu'anhu, beliau mengatakan bahwa:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda,

“barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya.”

Idealnya dalam akad *Ijarah* atau jual beli jasa pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqh mengatakan hukum asal Muamalat, yaitu dalam bermuamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, jadi dalam praktek upah-mengupah yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yang dalam pembayaran upahnya memenuhi salah satu syarat, yakni syarat adanya pemberian nominal upah yang jelas seperti kerja sama antara Bapak Sahroni dan bapak Lasmun, juga dengan Bapak Mahroji dengan Bapak Hadi menggunakan adat kebiasaan tersebut sebab tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu terdapat dalil yang membenarkan praktek upah-mengupah yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Hadis tersebut jelas menerangkan bahwasannya “*Barang siapa mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah upahnya*”, maka dari itu sudah jelas bahwasannya adat kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan oleh syara. Karena

dalam prakteknya kerja sama ini sudah melanggar hadis, aturan dari sabda Rasulullah SAW, yang menganjurkan untuk melakukan akad yang jelas pada saat melakukan sebuah akad dan dalam praktek mengupah ini di anjurkan untuk memberi nimal upah yang harus diberikan pada saat mempekerjakan buruh.

Menentukan upah harus adanya kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar nominal upah yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa) agar dalam melakukan akad upah-mengupah ini tercapai dengan baik dan sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa.

Penting dalam praktek pengupahan ini ialah setiap pekerja atau buruh berhak atas imbalan atau upah manusiawi yang layak bagi para penerima jasa, apabila upah *mu'ajir* (pemberi jasa) tidak memberikan upah dan apabila upah tersebut dibawah minimum upah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena lebih mementingkan maslahat bagi para pekerja buruh. Perlu diketahui bahwa dalam setiap kerelaan individu merupakan hal tersembunyi, yang tidak menjadi petunjuk atas kerelaan dengan adanya akad atau syarat dalam upah-mengupah harus jelas. Anjuran dalam praktek upah-mengupah ini setiap melakukan akad lebih baik dengan lafaz-lafaz yang jelas, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak baik pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan penerima *musta'jir* (penerima jasa), sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecaha persaudaraan antara kedua belah pihak.

Standar upah yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok para buruh agar buruh dapat hidup dengan layak dan sejahtera, makadari itu hukum yang dibuat oleh Allah SWT, hadis-hadis abda Rasulullah SAW dan kesepakatan para ulama adalah hukum yang sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upah buruh tani tanpa akad di awal di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa sudah berakhir. Tidak adanya penjelasan kisaran nominal upah yang akan diberikan. Karena hal ini didasarkan pada kebiasaan yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Prakteknya mereka tidak melakukan akad upah-mengupah yang jelas terlebih seperti tidak jelas nominal upah dan tidak adanya kesepakatan hak-hak dan kewajiban yang jelas dalam prakteknya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upah-mengupah ini tidak dibenarkan dalam Syara' atau Hukum Islam, sebab dalam kegiatan muamalah yang terdapat di desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan, tidak diperbolehkan, sebab tidak sesuai dengan hadis dan tidak memenuhi syarat Ijarah yang mengharuskan mengetahui upah di awal. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, serta dapat terjadi kesenjangan sosial dalam bermasyarakat baik antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa), sebab

dalam pelaksanaan upah-mengupah ini harus jelas syarat-syarat, dan adanya lafaz-lafaz jelas seperti hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

B. saran

1. Agar lebih memahami dan paham terhadap semua berkaitan dengan sistem perjanjian atau kontrak kerja, terutama pada kesepakatan akad harus diperjelas lagi, karena idealnya dalam melakukan akad harus diperjelas. Pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak dapat merugikan salah satu pihak.
2. Agar para pihak antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan pihak *musta'jir* (penerima jasa) menjalankan pekerjaan bertanggung jawab dan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada saat menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, sehingga dalam melakukan akad yang telah dilakukan tidak merugikan antara kedua belah pihak yakni pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rizky, *Penjualan konsignasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.
- Ali Hasan MA, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Prenada media, 2004
- Antono Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2007, Cet ke VIII.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Desi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: 2005.
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haidar Ali, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Jilid 1-3, Pasal 96
- Hasanuddin M dan Sahroni Oni, *Fikih Muamalah 'Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Grenta Press, 2008.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1990.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami; al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 82, h. 744, hadis ke-2006.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016

Ningrat Kencana , *Metode Penelitian Masyarakat*, Bandung: Gramedia Pustaka, 1990.

Qhardawi yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Hafiduddin Didin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, cet. 1, (Rabbani Press, 1997.

Rasyd Ibnu, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Rusfi Muhammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Al-Adal*, Vol.XII, No.1 Juni 2014, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung), (on-line), tersedia di: https://scholar.google.co.id/scholar?cluster=1528000667837168670&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D86%20oKMNBU (15 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah Jilid 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif 1987

Subagyo Joko P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Melton Putra, 2011.

Shihab Quaraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (2000).

Sohari dan Sanusi Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sumitro Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005.

Syafe'i Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

